

Swara
POLITIKA
Jurnal Politik dan Pembangunan

Prospek Pemilu 2004 dalam Pembangunan Politik di Indonesia

Riswandha Imawan 4 - 9

Pemilu 2004 dan Demokratisasi

M. Soebiantoro 10 - 15

Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

Budi Winarno 16 - 28

**Perilaku Perempuan Dalam Memilih Pemimpin Studi Kasus
di GOW Kabupaten Banyumas**

Bambang Kuncoro 29 - 35

**Pemajuan Isu Perempuan Dalam Perpolitikan Internasional :
Strategi Konferensi Sebagai Salah Satu Media Consciousness Rising
dan Implementasinya di Indonesia**

Nuriyeni Kartika Bintarsari 36 - 42



Diterbitkan
Laboratorium Ilmu Politik
FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Daftar Isi

Susunan Redaksi	1
Daftar Isi	2
Dari Redaksi	3
Prospek Pemilu 2004 dalam Pembangunan Politik di Indonesia Riswandha Imawan.	4 - 9
Pemilu 2004 dan Demokratisasi M. Soebiantoro	10 - 15
Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Budi Winarno.....	16 - 28
Perilaku Perempuan Dalam Memilih Pemimpin Studi Kasus di GOW Kabupaten Banyumas Bambang Kuncoro.....	29 - 35
Pemajuan Isu Perempuan Dalam Perpolitikan Internasional : Strategi Konferensi Sebagai Salah Satu Media <i>Consciousness Rising</i> dan Implementasinya di Indonesia Nuriyeni Kartika Bintarsari.....	36 - 42
Resensi Buku	43 - 47

PEMAJUAN ISU PEREMPUAN DALAM PERPOLITIKAN INTERNASIONAL: STRATEGI KONFERENSI SEBAGAI SALAH SATU MEDIA *CONSCIOUSNESS RISING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh : Nuriyeni Kartika Bintarsari
Staf. Pengajar Jurusan Ilmu Politik
Fisip Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This article was written to explain a series of international women conferences held by the United Nations Organizations for several times. Conference is widely known as a strategy in the international political theories, especially to discuss issues such as; food, population, energy, woman roles and science and technology of development.. The advancement of women issues have become one of the world primary concern since 1970es. It specifically become one of the world largest issue and therefore the results of those conferences have become the main source or a yard pole for the governments member of United Nations Organization to imply upon women perspectives in their development policies. Among those member states, Indonesia as one of the participant country in every women conference has had at least a morale obligation to implement and emphasize the urgency to mainstreaming women perspectives in it's national policies. We will discuss the advancement of women issues in the international and national level, particularly in Indonesia.

A. Pendahuluan

Politik internasional seringkali melibatkan peran PBB sebagai salah satu organisasi berskala dunia yang mempunyai anggota sebanyak 190 negara. Salah satu kekuatan organisasi internasional ini adalah kemampuannya untuk mengubah suatu isu yang spesifik di tingkat lokal menjadi wacana yang menggugah kesadaran publik dunia (*consciousness rising*) dan terus menggelinding menjadi satu agenda internasional (*agenda setting*). Dalam kaitannya dengan pemajuan isu perempuan, bisa dikatakan bahwa isu ini mencuat setelah Perang Dunia ke 2 ketika timbul kesadaran bahwa kondisi perempuan diseluruh dunia, baik yang ada dinegara maju maupun berkembang, masih dibawah standar hak

hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Masalah-masalah seperti: kemiskinan, tingginya angka buta huruf, kekurangan gizi, diskriminasi upah di dunia kerja, maupun berbagai tindak kekerasan yang seringkali dialami perempuan di lingkungan domestik maupun publik turut menguatkan asumsi tersebut. Sebagai lembaga internasional perhatian PBB terhadap isu perempuan ini dinilai cukup tinggi, terlihat dari kesediaannya menjadi fasilitator berbagai pihak yang ingin bertemu untuk membahas isu sensitif ini secara global. Sejak tahun 1975 sampai tahun 2000 terhitung telah empat kali PBB menggelar konferensi wanita internasional. Pertama, tahun 1975 di *Mexico City*, Meksiko. Kedua, di *Kopenhagen*,

Denmark pada tahun 1980. Ketiga, tahun 1985 di *Nairobi*, Kenya. Konferensi terakhir merupakan event paling akbar dan melibatkan anggota PBB paling banyak sepanjang sejarah, berlangsung tahun 1995 lalu di *Beijing*, Cina. Dimana pada tahun 2000 diadakan sidang lanjutan untuk mengevaluasi hasil konferensi Beijing ini (*Beijing+5*) di New York, USA.

Keempat konferensi ini mampu menaikkan isu-isu perempuan yang bersifat lokal menjadi isu internasional, dimana Indonesia juga berperan didalamnya ketika memasukkan isu ketidakadilan gender yang terjadi akibat implementasi Revolusi Hijau sekitar tahun 1975 maupun kasus penjualan anak-anak dan perempuan serta isu buruh migran (TKI) yang mengemuka sekitar akhir tahun 1990an. Setiap penyelenggaraan konferensi menghasilkan 2 hal, yaitu; Deklarasi dan Rencana Aksi (*Platform for Action*), yang meliputi komitmen bersama tiap negara partisan dan berbagai lembaga non pemerintah yang mengikuti konferensi tersebut.

Kita hendak melihat bagaimana perkembangan pemajuan isu perempuan di tingkat internasional dan nasional dengan penekanan pada berbagai hasil konferensi tersebut dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia untuk menindak lanjuti komitmennya terhadap hasil konferensi tersebut.

B. Kerangka Teori

Secara umum, ilmu politik menegaskan bahwa pemilihan strategi dilakukan berdasarkan jenis isu yang dihadapi. Foster (1990) menegaskan definisi strategi sebagai: 'the comprehensive direction of power to control situations and areas in order to attain

objectives' (arah kekuatan yang menyeluruh untuk mengontrol situasi dan keadaan dalam rangka mencapai tujuan). Menurut Fisher and Ury (1995:397), strategi konferensi efektif untuk memajukan isu perempuan karena; pertama, konferensi mengikutsertakan presiden, perdana menteri dan kepala pemerintahan lainnya sehingga dapat menempatkan problem jangka panjang dan sulit menjadi urutan pertama dalam agenda global. Kedua, partisipasi ribuan organisasi non-pemerintah, warga negara, akademisi dan pelaku sosial lainnya telah mengubah konferensi menjadi 'forum global' untuk mendiskusikan satu isu. Ketiga, konferensi mampu menonjolkan kekuatan terbesar sistem PBB, yaitu kemampuan untuk bergerak dari *consciousness rising*; ke agenda setting; ke perjanjian yang dilaksanakan oleh negara anggota; follow up dari komitmen konferensi; sampai ke bantuan efektif bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan komitmennya.

Berbagai aktor ikut berperan dalam aktivitas *transnasional* ini, yang didefinisikan Thomas Risse-Kappen (1995) sebagai: 'Interaksi-interaksi reguler yang melewati batas negara, dimana paling sedikit satu aktor tidak mewakili pemerintah satu negara atau mewakili organisasi antar pemerintah'. Lebih lanjut, Risse-Kappen (1995) menegaskan bahwa pada dasarnya, tidak ada satu aktor politik di dunia ini yang dapat berperilaku secara individual, karena proses globalisasi membuat tiap negara rentan terhadap penetrasi dunia luar. Dalam kaitannya dengan proses berjalannya interaksi antara negara dan aktor internasional lain, kita akan menganalisa sejauhmana efektivitas strategi konferensi ini mempengaruhi kebijakan tiap negara, khususnya pengaruhnya terhadap

pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu kesejahteraan perempuan.

C. Pembahasan

Konferensi Meksiko secara resmi dimulai tanggal 19 Juni-Juli 1975. Diikuti sebanyak 133 negara anggota PBB, 113 delegasi diketuai oleh perempuan, 15 wakil badan PBB, 114 LSM yang mempunyai status konsultatif dengan organ PBB dan 80 LSM lain dari seluruh dunia. Menurut Birchem (1996), ribuan orang berpartisipasi dalam forum yang dinamakan *International Women's Year Tribune* ini, dimana ribuan laki-laki dan perempuan dari berbagai wilayah dan latar belakang berbeda berkumpul untuk saling bertukar informasi mengenai kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik mereka.

Dua hasil terpenting dari konferensi ini adalah: **Deklarasi Meksiko** dan **Rencana Aksi Dunia** untuk mewujudkan tujuan Tahun Wanita Internasional (*International Women's Year*). Secara umum kedua hasil ini menegaskan komitmen tiap negara partisipan dan wakil lembaga lain untuk lebih memperhatikan isu-isu kesehatan ibu dan anak, akses perempuan dalam ekonomi dan dilibatkannya perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Indonesia belum mengadopsi kedua keputusan ini secara resmi, namun pengaruhnya terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah, diantaranya timbul kesadaran bahwa kaum perempuan pedesaan (petani) telah menjadi korban dari program Revolusi Hijau yang menekankan pada konsep mekanisasi dan berakibat hilangnya sejumlah pekerjaan yang dulu dikerjakan petani perempuan. Konsep pembangunan bertitik tolak dari pandangan bahwa perempuan merupakan objek dari

pembangunan dan memerlukan kebijakan khusus yang dipakai pemerintah ini disebut konsep WID (*Women in Development*).

Pencanangan program Keluarga Berencana dan pos-pos kesehatan ibu anak mulai dibangun diberbagai daerah, UNIFEM (*United Nations Development Fund for Women*) yang terbentuk pasca konferensi Meksiko mulai membuat program bantuan terhadap beberapa usaha kecil menengah yang dimotori kaum ibu diberbagai daerah di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan pendidikan ketrampilan terhadap kaum perempuan antara badan PBB seperti UNESCO, WHO, INSTRAW (*International Research and Training Institute for The Advancement of Women*) dan dinas instansi terkait mulai menjangkau perempuan di wilayah pedesaan.

- Konferensi wanita internasional kedua diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 14-30 Juli 1980 dihadiri 145 negara anggota PBB. Tema utama pertemuan ini adalah; tenaga kerja, kesehatan dan pendidikan. Asumsi penyelenggara adalah kemajuan perempuan diseluruh dunia dalam pembangunan akan terbantu bila akses perempuan terhadap 3 hal itu membaik. Sjamsiah Ahmad (2000) menyatakan bahwa hasil terpenting dari konferensi ini adalah:

- Program Aksi untuk Bagian Kedua Dasa Warsa PBB untuk Wanita (1980-1985) yang dilengkapi sub-tema: ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan sebagai bidang utama disamping 7 bidang lain yang menjadi perhatian khusus, yaitu; pangan, perempuan pedesaan, pemeliharaan

anak, perempuan migran, perempuan tidak bekerja, perempuan sebagai kepala keluarga dan perempuan muda.

- 48 resolusi tentang berbagai aspek yang perlu diberi perhatian dan segera ditangani, termasuk resolusi tentang "wanita yang dicerai dan tindak kekerasan dalam keluarga".
- Penandatanganan CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) oleh puluhan delegasi pemerintah dan pernyataan bahwa tindakan ini akan dilanjutkan dengan pembuatan satu bentuk konvensi secara legal ditingkat nasional.
- Konvensi anti diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW ini merupakan alat legal pertama yang mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia untuk pertama kali membuat satu perangkat UU khusus isu perempuan. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Pasal 1 UU No.7 tahun 1984 ini menyebutkan istilah 'diskriminasi terhadap wanita' berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan perempuan (Kompas;2004). Dimulai dari

pengesahan konvensi ini kemudian terbentuklah berbagai organisasi perempuan non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan, seperti; LBH Apik, Solidaritas Perempuan dan lainnya. Sebetulnya keseriusan upaya pemerintah untuk memasukkan isu perempuan dalam tingkat legal formal terlihat sejak tahun 1983. Dalam GBHN periode itu disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan.

Evaluasi kedua konferensi wanita internasional tersebut disepakati akan diselenggarakan dalam bentuk konferensi ketiga. Konferensi ketiga ini diselenggarakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 15-26 Juli 1985. Konferensi Nairobi dihadiri 157 negara, 8 badan khusus PBB, 17 organisasi antar pemerintah, dan 163 LSM. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk membuat langkah-langkah kongkret mengatasi hambatan pencapaian dekade PBB untuk Wanita.

Selama masa persidangan, panel berusaha menghimpun keterangan sekitar 15.000 orang perwakilan organisasi akar rumput dari seluruh dunia yang menyampaikan laporan berbagai tindak diskriminasi dan kekerasan secara de jure maupun de facto di negara mereka. Identifikasi masalah tersebut membuat para partisipan membuat satu rujukan atau panduan berisi langkah-langkah strategis yang diharapkan mampu mereduksi hambatan pencapaian kemajuan tersebut. Hasil dari konferensi ini yang terpenting seperti termuat dalam *The Nairobi Forward-Looking Strategies for The Advancement of Women* (1985), adalah;

- Strategi Berwawasan Ke depan untuk Kemajuan Wanita menjelang tahun 2000 (*Forward Looking Strategies for The Advancement of Women to the Year 2000/Nairobi F.L.S.*)
- Penerbitan Survei Dunia I tentang 'Peranan Wanita dalam Pembangunan', yang pada awalnya merupakan tema pendukung dalam konferensi. Handbook Survei Dunia I ini diterbitkan tahun 1986.
- Sebagai revisi atas kebijakan *Women in Development* (1975) yang dicetuskan pada konferensi pertama, panel di Nairobi memutuskan untuk mensosialisasikan pendekatan *Gender and Development* yang lebih melihat faktor hubungan relasi/ relasi jender sebagai persoalan kegagalan pencapaian pemerataan pembangunan.

Pendekatan konsep WID memposisikan perempuan sebagai objek pembangunan tanpa mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan, bahkan mengakibatkan mereka memikul beban ganda, di dunia privat dan publik. Hal ini diakomodasi pemerintah Indonesia dengan mulai merevisi beberapa kebijakan pembangunannya, namun pembuatan kebijakan pembangunan berbasis GAD tidak berlanjut sampai tahun 2000 sesudah Konferensi Beijing.

Konferensi wanita internasional terakhir diadakan di Beijing, RRC, pada tanggal 30 Agustus-15 September 1995. Dihadiri oleh 189 negara, 17.611 anggota delegasi resmi dan 26.549 orang wakil LSM dari sekitar 2.100 lembaga yang terdaftar, serta untuk pertama kalinya ada perwakilan sejumlah 5.000 media internasional. Forum

konferensi terbagi dua, yaitu; forum untuk LSM (30 Agustus- September) dan forum untuk delegasi pemerintah (4-15 September). Tujuan konferensi ini untuk mengevaluasi implementasi Strategi Nairobi dan mengantarkan kemajuan wanita menuju abad 21 dan abad selanjutnya (*un.org:1995*). Hasil-hasil konferensi terpenting adalah:

- **Deklarasi Beijing**, terdiri dari 38 pasal. Diantaranya merupakan konsensus delegasi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan pengambilan keputusan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Terutama untuk memastikan bagaimana keadilan jender dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan. Salah satu programnya adalah memasukkan kebijakan jender dalam pembangunan/ pengarusutamaan jender (*Gender mainstreaming*).

- **Kerangka Aksi (*Platform for Action*)**. Pemilihan 12 bidang kritis yang memerlukan pemusatan perhatian, termasuk penyikapan terhadap praktek penjualan anak-anak dan perempuan, perempuan di wilayah konflik, isu pekerja perempuan dan perempuan dalam dunia publik (politik).

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti kedua keputusan diatas dengan mengeluarkan **Inpres No.9 Tahun 2000** tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional, disertai dengan pedomannya. Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Bupati/walikota.

DPR RI menyetujui adanya UU No.39

Tabel 1. Konferensi Wanita Internasional I-IV

KONFERENSI	PARTISIPAN	HASIL-HASIL TERPENTING	KEBIJAKAN TERKAIT PEMERINTAH RI
Konferensi I (Mexico City 1975)	133 Negara, 113 Delegasi, 114 Lsm Resmi, 80 Organisasi Akar Rumput	Deklarasi Meksiko dan Rencana Aksi Dunia	Implementasi Wid, Pelatihan Ketrampilan Dan Layanan Kesehatan (kb & Kia)
Konferensi II (Kopenhagen 1980)	± 133 Negara, 2000 Individu Utusan Delegasi, 114 Lsm Resmi	Program Aksi, 48 Resolusi dan Konvensi Cedaw	Gbhn 1983, Uu No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Cedaw
Konferensi III (Nairobi 1985)	157 Negara, 8 Badan Khusus Pbb, 163 Lsm	Strategi Nairobi Handbook Survei Dunia I	Perubahan Paradigma Pembangunan Nasional Dari Wid Ke Gad
Konferensi IV (Beijing 1995)	189 Negara, 17.611 Anggota Delegasi 26.549 Orang Wakil Lsm, 2.100 Ornop, 5.000 Wakil Media	Kerangka Tindak Beijing Dan Deklarasi Beijing	Uu No. 39 Tahun 1999, Inpres No. 9 Tahun 2000, Uu No. 12 Tahun 2003 Pasal 6(1)

Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, didalamnya hak kaum perempuan dicantumkan khusus dalam pasal 45-51, dimana disebutkan selain memiliki hak-hak asasi mereka juga mempunyai hak-hak tertentu yang khusus, baik di sektor publik atau domestik. Isu perempuan dalam politik yang terbaru adalah dengan diundangkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 6(1), yang mempersyaratkan kuota 30% bagi perempuan sebagai kandidat anggota parlemen (caleg) pada pemilu 2004. Meskipun pada dataran de facto masih banyak partai yang belum bisa memenuhi kuota tersebut, namun ini bisa dipandang sebagai langkah afirmatif yang membantu perempuan berkiprah didunia politik.

D. Penutup

Dari uraian diatas, kita melihat bahwa proses pemajuan isu perempuan berjalan dua arah, pertama, dari aras internasional dengan penyelenggaraan keempat konferensi yang dihadiri berbagai aktor internasional, kemudian hasil panel tersebut akan diadopsi oleh masing-masing negara yang berpartisipasi. Indonesia mengadopsi beberapa deklarasi dan kerangka aksi dengan membuat sejumlah UU, Inpres atau satu perangkat program kebijakan tertentu, seperti program pengarusutamaan jender. Implementasi berbagai program pemajuan perempuan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus dilakukan oleh individu maupun organisasi non

pemerintah yang *concern* terhadap isu ini, terutama mereka yang mempunyai akses langsung di tingkat akar rumput masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sjamsiah: *Implementasi hasil-hasil konferensi dunia ke-IV tentang wanita di Beijing tahun 1995 dan sidang khusus MU PBB Juni 2000; Gender equality, Development and Peace for the twenty first century*. Jakarta. 2000
- Birchem, Regina: *A feminist agenda for a sustainable future*. The Brown journal of world affairs. Vol III. Summer/fall. 1996
- Foster, D.Gregory: *A Conceptual Foundation for a theory of strategy*. The Washington Quarterly. USA. Winter. 1990
- Risse-kappen, Thomas: *Bringing Transnational Relations Back in; Non state actors, Domestic structures and international institutions*. Cambridge University Press. UK. 1995.
- The Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women: as adopted by the world conference of women in Nairobi, Kenya. 15-26 July 1985*. United Nations publication section. USA. 1985
- The United Nations and The Advancement of Women: 1945-1996*. Department of Public Information. New York. USA. 1996
- Fisher and Ury: *The Art of preparing a Multilateral Conference; Negotiation Theory and Practice*. Harvard Law School. Cambridge. USA. 1995

